KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MIKRO SUMUT SEJAHTERA II BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI PADA PT. BANK SUMUT)

ANASTASIA ADINDA SYAHPUTRI NASUTION

ABSTRAK : Micro, Small and Middle Business (Law No 20 of 2008) provides one of the economic policy of the government to help the people of funding disbursed by the financial institution according to the regulation of Bank Indonesia No 14/22/PBI/2012 about credit or financing by commercial bank and Technical Assistance for Development of Micro, Small and Middle Business as well as non-bank financial institutions in the form of loans (credit), therefore the Micro, Small and Middle Business also have a strategic role in the fight against poverty. As for the title of the scripition is “Judicial Study Against Giving The North Sumatera Property Micro Credit II According to the Law No 20 of 2008 about Micro, Small and Middle Business (Studies in PT. Bank Sumut)”, with problem such as what are the types of loans for Micro, Small and Middle Business in the PT. Bank Sumut, how the requirements and the process of North Sumatera Prosperity Micro Credit II in PT. Bank Sumut as well as how the rights and obligations of the parties in the provision of North Sumatera Prosperity Micro Credit II in PT. Bank Sumut. The method applied in this writing is a normative law study and using secondary data that consist of primary, secondary, tertiary legal materials. The data collected through library research and supported by data obtained through field research at PT. Bank Sumut using a qualitative approach to produce a descriptive.

The results in this research scripition concludes that the types of loans at PT. Bank Sumut in accordance with the types of credit in general, such as Public Credit, Credit Installment Others (KAL), Credit Sumut Prosperous I (SS I) and North Sumatera Prosperity Micro Credit II (SS II). The requirements to get the loans from North Sumatera Prosperity Micro Credit II is to make a written request, a copy of identity, have a business license from authorities (Ward/Village Head, Head of Market), photo business location and a place to stay, a copy of proof of collateral/insurance, and savings accounts. Stage loans consist of marketing and promotion stage, the stage of credit analysis, loan disbursement stage, and the stage of supervision and monitoring. Rights of borrowers are receiving loans disbursed a sum of money to the account debtors and receives back guarantee proof and other documents if the debt has been repaid, his duty is to pay installment over a specified time and pay all cost incurred for the implementation of the credit agreement. While the right of creditors are receiving appropriate time agreed installments and rceive proof of collateral/guarantees and other documents, while the obligation of creditors is pay binding, insurance credit and guarantee services, also giving back the evidence of collateral to the debtor if the debt has been repaid.

Keywords : *Credit, Micro, Small and Middle Business*

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro maupun kredit. Adanya tabungan, deposito, maupun kredit menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan.¹

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.² Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, yang antara lain adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi tahun 1997/1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Saat itu roda perekonomian seakan mati suri, bisnis cenderung berjalan di tempat dan banyak pelaku bisnis terpaksa gulung tikar yang umumnya adalah pengusaha yang memiliki skala bisnis yang cukup besar atau yang masuk dalam kategori usaha besar. Penopang roda perekonomian agar dapat terus berjalan hanya pelaku bisnis yang masuk dalam kategori UMKM yang dapat bertahan dengan kokoh khususnya usaha mikro.³ UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu ekonomi rakyat kecil, yang pendanaannya disalurkan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank dalam bentuk

¹ Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Temprint, Jakarta, 1993, hal.4.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.95.

³ Bendi Linggau & Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro, Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2010, hal.15.

pinjaman yang biasa disebut dengan kredit. Upaya Pemerintah untuk membantu pendanaan UMKM selain dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, juga dinyatakan dalam Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan dari Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Inpres ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Dari sisi Perbankan, Bank Indonesia mewajibkan pihak perbankan menyalurkan kredit untuk UMKM sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM. Untuk tercapainya peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari pihak perbankan kepada UMKM, perlu penguatan pemberian bantuan teknis oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan perbankan serta pelaku usaha.

Dalam rangka inilah PT. Bank Sumut melaksanakan program pemberian kredit dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk kredit khusus untuk melayani segmen usaha mikro yang dinamakan dengan Kredit Sumut Sejahtera I (SS I). PT. Bank Sumut melakukan program kredit ini terinspirasi dari seorang tokoh bernama Prof. Muhammad Yunus yang memenangkan sebuah penghargaan nobel karena mengembangkan kredit mikro melalui Grameen Bank, dengan dukungan *technical assistance* dari *Asian Development Bank* (ADB). Pada tahun 2008 PT. Bank Sumut kemudian mengembangkan model pembiayaan replikasi pola Grameen Bank yang kemudian diberi nama Kredit Sumut Sejahtera I, yang bertujuan untuk memulihkan kembali perekonomian keluarga pra sejahtera di Pulau Nias akibat terjadinya gempa dan tsunami. Hasilnya, lebih 4.000 debitur kelompok perempuan pra sejahtera di sana berhasil bangkit dan semakin percaya diri untuk mengembangkan usahanya. Pemberian kredit ini juga dilakukan PT. Bank Sumut untuk memberantas penggunaan jasa rentenir yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha kecil karena tidak memiliki akses ke bank atau dengan kata lain tidak adanya bank yang mau memfasilitasi untuk permodalan guna berjalannya usaha dari pelaku usaha kecil tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari PT. Bank Sumut itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Daerah Sumatera Utara.

Sukses dengan *pilot project* nya di Nias, program ini kemudian dikembangkan pada tahun 2009 secara bertahap di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Atas dasar

keberhasilan yang cukup pesat dari program kredit Sumut Sejahtera I ini, PT. Bank Sumut membuka program kredit yang khusus untuk segmen Usaha Mikro dan Kecil, yang dinamakan Kredit Mikro Sumut Sejahtera II yang memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan Kredit Mikro Sumut Sejahtera I. Kredit Mikro Sumut Sejahtera II ini bisa diberikan kepada setiap orang perorangan dan tidak hanya khusus kepada kelompok perempuan saja, tapi boleh kepada perorangan dan tidak harus per kelompok. Pemberian kredit ini tetap mengacu pada asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu pelaku usaha di bidang Usaha Mikro khususnya yang hendak mendapatkan fasilitas Kredit Mikro Sumut Sejahtera II tersebut harus mengetahui jenis-jenis kredit yang terdapat pada PT. Bank Sumut, persyaratan dan proses pemberian kreditnya serta mengetahui hak dan kewajibannya.

Berbagai macam undang-undang telah banyak dibentuk oleh wakil rakyat dan pemerintah, akan tetapi dalam bidang hukum utang piutang yaitu Undang-Undang Perkreditan belum ada sampai sekarang. Selama ini peraturan tentang perkreditan banyak diatur oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sifatnya tidak berlaku umum karena tujuannya mengatur bank operasional. Bank Indonesia hanya mengatur yang ruang lingkungannya untuk kepentingan bank.⁴ Dalam praktek, masyarakat berhubungan dengan bank, transaksinya didasarkan pada sebuah perjanjian. Perjanjian bank dengan nasabahnya dilandasi kata sepakat dan mengikat kedua belah pihak bagaikan undang-undang. Jadi nasabah dalam berhubungan dengan bank tunduk pada perjanjian yang telah dibuat. Kredit pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dalam buku ketiga KUHPerdara ada ketentuan tentang pinjam meminjam (Pasal 1754 KUHPerdara), yang peraturannya bersifat umum sehingga ketentuan tersebut sulit ditetapkan pada perjanjian kredit. Perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya merupakan perjanjian khusus.

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebenarnya kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan,

⁴Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.151.

bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.⁵

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama.⁶ Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuannya serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.

Dalam Undang-Undang Perbankan hanya mengatur tentang lembaga yang memberikan kredit, sehingga pembentuk undang-undang kurang memperhatikan tentang masalah kredit. Ketentuan yang menyangkut kredit hanya satu pasal yaitu yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijumpai jenis-jenis/macam-macam kredit. Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

- a. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi, misal : membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.

⁵Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.236.

⁶Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.172.

- b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misal : kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, misal : untuk membangun pabrik yang akan menghasilkan barang, kredit pertanian untuk menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan untuk menghasilkan bahan tambang, dan sebagainya.
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha, misal : kredit perumahan, kredit mobil, kredit peralatan rumah tangga, dan sebagainya.
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah besar, misal : kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, misal : untuk peternakan ayam atau jika untuk pertanian kredit untuk tanaman padi atau palawija.
- b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, biasanya untuk investasi, misal : kredit untuk pertanian jeruk atau kredit peternakan kambing.
- c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Biasanya waktu pengembaliannya di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Kredit ini untuk investasi jangka panjang, misal : kredit untuk perkebunan karet, kelapa sawit.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk kambing atau sapi.
 - c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.
 - d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang membiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah
 - e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana atau prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
 - g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
 - h. Dan sektor-sektor lainnya.⁷

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara

⁷Kasmir, *Op.Cit*, hal.103-106.

(BUMN).⁸ Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tanggal 4 Juli 2008.

Setiap pemberian kredit akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat, yaitu pihak bank dan pihak debitur. Masing-masing pihak harus mengetahui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan tidak mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku dan sudah diperjanjikan sehingga muncul hubungan hukum antara keduanya yaitu nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengertian kredit dibatasi dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga dan juga diartikan dengan tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang. Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga yang merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.⁹ Seperti telah diuraikan dalam pengertian kredit di atas, bahwa kredit erat hubungannya dengan perjanjian karena kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perikatan yaitu dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Di dalam Buku Ketiga KUH Perdata terdapat bermacam-macam perjanjian yang salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam/pinjam pengganti yang tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

⁸Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁹Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal.153.

Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabahnya yang diikuti dengan pemberian bunga. Berhubung perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam uang maka menurut Gatot Supramono perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti, karena objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama, ditambah dengan bunga. Dengan demikian perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada bank dengan nasabahnya dan objek yang diperjanjikan selalu berupa uang. Sebagai perjanjian khusus, sampai sekarang perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Hal ini bukan sebagai penghalang atau hambatan untuk membuat perjanjian tersebut karena hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah jenis-jenis kredit UMKM di PT. Bank Sumut?
2. Bagaimanakah persyaratan dan proses pemberian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II (SS II) yang diberikan oleh PT. Bank Sumut kepada nasabah?
3. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II (SS II) di PT. Bank Sumut?

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁰

2. Sifat Penelitian

¹⁰*Ibid*, hal.52.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang menyajikan, menggambarkan dan memaparkan mengenai gejala-gejala dan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah :

“suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.”¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan lain serta internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta didukung oleh data yang diperoleh dari studi lapangan di PT. Bank Sumut.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari kaedah dasar berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku hasil karangan ilmiah dari kalangan kalangan hukum, doktrin atau pendapat para sarjana serta hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini.

¹¹*Ibid*, hal.10.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya.¹²

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengkaji permasalahan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,¹³ serta didukung dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara melakukan penelitian pada PT. Bank Sumut melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian analisis data merupakan suatu tahap yang sangat penting, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga didapat gambaran yang komprehensif. Selanjutnya ditarik satu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan studi lapangan (*field research*) sehingga diperoleh penelitian yang bersifat deskriptif.

JENIS-JENIS KREDIT UMKM DI PT. BANK SUMUT

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut khususnya di bidang UMKM terdapat beberapa jenis yaitu :

1. Kredit Umum

Kredit umum adalah kredit untuk menambah modal kerja pengusaha sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut. Kredit ini berbentuk kredit rekening koran.

Adapun keunggulan dari kredit ini adalah :

- a. Suku bunga kredit 15% per tahun (*floating rate*) pemohon > Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 16% per tahun (*floating rate*) pemohon ≤ Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Jangka waktu kredit 12 bulan dan dapat diperpanjang/diperbaharui lagi.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.13.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.21.

- c. Jaringan telah *online* sehingga dapat bertransaksi di semua kantor Cabang PT. Bank Sumut
- d. Biaya provisi 1% dari nilai *plafond*.
- e. Biaya administrasi sesuai dengan klasifikasi *plafond*.

2. Kredit Angsuran Lainnya

Kredit Angsuran lainnya merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai usaha produktif dan/atau mempunyai penghasilan tetap untuk tujuan membiayai keperluan yang bersifat investasi, modal kerja, dan konsumtif.

Keunggulan dari Kredit Angsuran Lainnya ini adalah :

- a. Suku bunga kredit bersaing, yaitu terdiri dari pemohon > Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), 15% per tahun (*floating rate*) dengan perhitungan bunga menurun (anuitas) dan pemohon < Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 16% per tahun (*floating rate*) dengan perhitungan bunga menurun (anuitas)
- b. Jangka waktu kredit paling lama adalah 5 tahun
- c. Pembayaran angsuran dapat dilakukan per bulan/tri wulan/semester
- d. Biaya profisi 1% dari nilai *plafond*
- e. Biaya administrasi disesuaikan dengan besar pinjaman

3. Kredit Sumut Sejahtera I (Kredit Peduli Usaha Mikro Sumut Sejahtera I)

Kredit Sumut Sejahtera I adalah kredit yang diberikan melalui kelompok keuangan yang dibentuk oleh *Credit Marketing Officer (CMO)* Bank Sumut dalam suatu kelompok keuangan mikro (KKM) yang beranggotakan 20-30 orang yang semuanya adalah kaum perempuan dengan melakukan edukasi perbankan berupa pembinaan, pelatihan, dan konsultasi pada pertemuan wajib mingguan.

Kredit Sumut Sejahtera I (Kredit Peduli Usaha Mikro Sumut Sejahtera I) merupakan penyediaan dana yang memiliki tujuan mulia yaitu fasilitas kredit kepada masyarakat pra sejahtera yang memiliki usaha mikro untuk memperbaiki taraf hidup keluarga pra sejahtera atau berpenghasilan rendah menuju ke taraf kesejahteraan yang lebih baik. Plafond kredit mulai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga 18% dihitung secara flat dengan jangka waktu 16 hingga 24 minggu.

Keunggulan persyaratan kredit adalah antara lain :

- a. Persyaratan mudah

- b. Bunga ringan
- c. Fasilitas tabungan bebas biaya administrasi dan gratis asuransi jiwa
- d. Tidak repot karena angsuran dan tabungan akan dijemput petugas bank

PERSYARATAN DAN PROSES PEMBERIAN KREDIT MIKRO SUMUT SEJAHTERA II (SS II) YANG DIBERIKAN OLEH PT. BANK SUMUT KEPADA NASABAH

Kredit usaha mikro ini mempunyai pengecualian (tidak dapat disalurkan) kepada :

1. Seluruh pegawai PT. Bank Sumut berikut keluarga (suami/istri dan anak)
2. Seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Sumut
3. Seluruh perusahaan yang dimiliki langsung atau yang memiliki keterkaitan dengan pegawai PT. Bank Sumut.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan diajukan secara tertulis dengan memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - 1) Profil debitur
 - 2) Jenis usaha
 - 3) Jumlah kredit yang dibutuhkan
 - 4) Tujuan penggunaan kredit (rencana kerja, ekspansi usaha, peningkatan penjualan)
 - 5) Jangka waktu kredit
 - 6) Untuk kredit investasi maupun modal kerja, wajib dicantumkan jenis barang yang akan dibeli dan harga belinya.
- b. Fotocopy identitas :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Buku Nikah/Surat Keterangan Menikah bagi yang telah menikah
 - 4) Pasfoto diri dan suami/istri ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
 - 5) Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Sumut (dapat dibuka pada saat SPPK disampaikan).
- c. Memiliki izin-izin usaha dalam menjalankan usaha minimal Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa atau Camat.

- d. Besarnya kredit yang dapat diberikan oleh Bank, baik untuk kredit investasi maupun modal kerja mempunyai *self financing* (pendanaan sendiri) minimal sebesar 30%.
- e. Foto lokasi usaha dan tempat tinggal sebagai data awal.
- f. Menyerahkan fotocopy bukti agunan/jaminan (asli diserahkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan).
- g. Seluruh transaksi keuangan dan/atau usaha setelah pencairan kredit harus dilakukan melalui rekening di PT. Bank Sumut.¹⁴

Adapun kriteria debitur yang diperbolehkan untuk memperoleh fasilitas Kredit Mikro Sumut Sejahtera II ini adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 21 tahun sampai dengan 65 tahun atau sudah menikah dan sehat jasmani rohani.
- b. Usaha perseorangan.
- c. Telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun buku dan terhadap usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh Bank.
- d. Fasilitas kredit mikro ini tidak diperkenankan kepada calon debitur yang sedang menikmati fasilitas kredit pada bank lain, tidak termasuk pinjaman pada *Credit Card*, *Leasing*, dan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) serta kredit konsumtif lainnya.
- e. Calon debitur tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu fasilitas kredit di PT. Bank Sumut, kecuali pegawai dan kredit konsumtif lainnya.

Kepemilikan dua rekening kredit pada PT. Bank Sumut dapat diterapkan atas dasar:

- a. *Cash flow* usaha masih mencukupi untuk melakukan angsuran kredit setiap bulan atas kedua fasilitas kredit.
- b. Jaminan yang diserahkan mencukupi dan *marketable*.
- c. Kredit bukan dimaksudkan untuk menutupi utang-utang debitur.

Angsuran untuk Kredit Mikro ini lebih diutamakan.¹⁵

Adapun proses pemberian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Promosi dan Pemasaran

Tahap ini diawali dari peranan *AO* yang menggunakan sistem jemput bola, artinya *AO* berperan untuk mencari nasabah di lingkungan atau jangkauan kerja dari setiap *AO*,

¹⁴Buku Pedoman Perkreditan Tentang Kredit Mikro Sumut Sejahtera II, *Op.Cit*, hal.7.

¹⁵*Ibid*, hal.7.

diutamakan berangkat dari wilayah terdekat dari unit kantor AO bertugas. Dalam hal ini AO melakukan pemetaan (*mapping*) di wilayah kerjanya sekaligus melakukan inisiasi dan sosialisasi untuk mencari calon debitur yang potensial sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

b. Tahap Analisa Kredit

Bagi calon debitur yang berminat untuk mendapatkan fasilitas kredit, harus membuat permohonan yang sudah disiapkan terlebih dahulu formulirnya oleh pihak bank. permohonan kredit tersebut juga sudah dibubuhi dengan tanda tangan calon debitur. Kemudian calon debitur juga harus melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Berkas permohonan kredit tersebut selanjutnya dibawa oleh AO untuk dimasukkan ke kantor untuk memperoleh disposisi dari pimpinan unit bank sumut. Kemudian AO melakukan *Checking On The Spot (COS)* secara sungguh-sungguh atas usaha calon debitur yaitu antara lain melakukan pengumpulan data yang dituangkan dalam *calculation sheet* yang sesuai dengan jenis usahanya baik dagang maupun jasa produksi sehingga memperoleh *profit margin*. Selanjutnya melakukan *interview* terhadap calon debitur tentang penjualan dan pembelian serta kas rata-rata per bulannya. Lalu melakukan pengujian hasil *interview* dengan *profit margin* yang diperoleh dan meminta data pengeluaran untuk usaha serta keluarga dari calon debitur yang secara rutin dikeluarkannya tiap bulan. Sekaligus meminta pendapatan dan pengeluaran keluarga (di luar usaha). Selanjutnya AO melakukan Taksasi yaitu menilai agunan/jaminan yang akan diserahkan dan mengambil foto jaminan serta melaporkan hasil analisa jaminan. AO membuat analisa tertulis yang di tuangkan ke dalam formulir, berupa potensi usaha, neraca, laba rugi, nilai agunan, dan persyaratan yang lainnya diserahkan ke Pemimpin Seksi Pemasaran. Apabila dianggap perlu, Pemimpin Seksi Pemasaran dapat melakukan *cross check* atau verifikasi atas laporan COS dan taksasi yang dibuat AO. Kalau sudah setuju maka langsung diserahkan ke Pimpinan Cabang/Cabang Pembantu .

c. Tahap Pencairan Kredit

Pencairan Kredit Mikro Sumut Sejahtera II ini maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah berkas masuk dan semua persyaratan dipenuhi, bila masa waktu 3 (tiga) hari terlewati, AO wajib memberitahukan kepada Pimpinan Cabang atau Pimpinan Cabang Pembantu. Tahap pencairan kredit ini bisa dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

1) Tahap Persiapan Pencairan Kredit

Setelah Pimpinan Cabang/Cabang Pembantu menyetujui permohonan kredit calon debitur maka Pimpinan Cabang/Cabang pembantu ini merealisasikan seluruh berkas ke bagian administrasi kredit untuk membuat nota pencairan dan nota-nota lain yang dibutuhkan untuk dilakukannya pencairan kredit. Selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan oleh Notaris.

2) Tahap Pencairan Kredit

Pencairan kredit dilaksanakan dengan membuat Perjanjian Kredit yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank di bagian administrasi kredit sekaligus juga biaya asuransi yang ditanggung oleh pihak PT. Bank Sumut yaitu PT. Askrido (Persero). Pencairan dana kredit tidak diberikan secara tunai melainkan melalui rekening tabungan debitur.

d. Tahap Supervisi dan *Monitoring*

AO melakukan kegiatan untuk memonitor laporan sistem bulanan dan melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur untuk mendeteksi agar terhindar dari kemacetan usahanya kemudian *AO* juga wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna kredit dan kegiatan usaha debitur termasuk pengamanan terhadap penggunaan kredit dan/atau piutang dan/atau barang agunan lainnya sesuai dengan ketentuan.¹⁶

Pemberian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II pada PT. Bank Sumut selain mengacu kepada Undang-Undang Perbankan, secara teknis juga mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO SUMUT SEJAHTERA II (SS II) DI PT. BANK SUMUT

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Sumut sesuai dengan perjanjian kredit, dapat diketahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak (debitur dan kreditur) yaitu :

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, Asisten IV Divisi Kredit/Koordinator Sentra UMK PT. Bank Sumut, tanggal 8 Maret 2013.

1. Hak-hak debitur

Pihak debitur memiliki hak untuk menerima uang pinjaman sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak kreditur yang dilakukan melalui cara pemindahan dana kepada rekening debitur. Hak lainnya, pihak debitur berhak untuk menerima kembali jaminan berupa barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak serta dokumen penting lainnya yang telah diserahkan kepada bank, sebagian atau seluruhnya setelah pihak debitur melunasi seluruh utang-utangnya.

2. Kewajiban-kewajiban debitur

Pihak debitur berkewajiban membayar suku bunga sebesar 15,6% per tahun dengan sistem *floating rate*, membayar angsuran kredit yang ditentukan sebesar jumlah pada daftar jadwal angsuran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kredit. Di samping itu debitur juga berkewajiban membayar biaya provisi kredit namun berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut biaya provisi tidak dipungut (bebas). Kemudian pihak debitur juga wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bea materai sesuai dengan kebutuhan. Pihak debitur juga berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran dan semua biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II ini. Kemudian pihak debitur juga berkewajiban menyerahkan jaminan kepada pihak kreditur (PT. Bank Sumut) berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak serta menyerahkan juga jaminan tambahan kepada bank seperti surat keterangan tempat usaha yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Dinas Pasar.

Adapun yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak kreditur (PT. Bank Sumut) adalah sebagai berikut :

1. Hak kreditur

Pihak kreditur berhak untuk menerima angsuran dan bunga dari pihak debitur sejumlah yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kredit. Pihak debitur juga berhak menerima biaya-biaya yang sudah diwajibkan kepada pihak debitur dan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak serta dokumen penting lainnya.

2. Kewajiban kreditur

Pihak kreditur berkewajiban untuk membayar biaya pengikatan dan biaya asuransi kredit serta jasa penjaminan. Selanjutnya pihak kreditur berkewajiban untuk mengembalikan jaminan yang

telah diserahkan kepadanya untuk dikembalikan kepada pihak debitur jika telah melunasi seluruh utang-utangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di PT. Bank Sumut, banyak dan bervariasi. Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut tersebut antara lain adalah Kredit Umum, Kredit Angsuran Lainnya (KAL), Kredit Sumut Sejahtera I (SS I), dan Kredit Mikro Sumut Sejahtera II (Sumut Sejahtera II) yang menjadi fokus dalam skripsi ini.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam Kredit Mikro Sumut Sejahtera II tersebut adalah membuat surat permohonan tertulis yang memuat informasi tentang profil debitur, jenis usaha, jumlah kredit yang dibutuhkan, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit, dan untuk kredit investasi maupun modal kerja wajib mencantumkan jenis barang yang akan dibeli dan harga dibelinya, fotocopy identitas, surat keterangan izin usaha, foto lokasi usaha dan tempat tinggal, fotocopy bukti agunan/jaminan, harus mempunyai rekening di PT. Bank Sumut. Kemudian proses pemberian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II tersebut terbagi atas 4 (empat) tahap, yaitu tahap promosi dan pemasaran, tahap analisa kredit, tahap pencairan kredit, serta tahap supervisi dan *monotoring*
3. Hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian Kredit Mikro Sumut Sejahtera II yaitu terdiri dari hak dan kewajiban pihak debitur dan pihak kreditur (PT. Bank Sumut). Sesuai dengan klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian kredit, debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman yang dilakukan melalui cara pemindahan dana ke rekening debitur dan menerima kembali jaminan dan dokumen penting yang diserahkan kepada PT. Bank Sumut jika utang telah dilunasi. Kemudian debitur wajib membayar angsuran dan bunga serta membayar semua biaya-biaya yang timbul karena dan untuk melaksanakan perjanjian kredit. Adapun yang menjadi hak kreditur (PT. Bank Sumut) adalah menerima angsuran dan bunga yang telah ditentukan besarnya dan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit serta menerima jaminan dan dokumen penting lainnya. Sedangkan kewajiban kreditur adalah membiayai pengikatan

dan asuransi kredit serta jasa penjaminan juga wajib mengembalikan jaminan jika pihak debitur telah melunasi utangnya.

B. Saran

1. Agar Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 41 undang-undang tersebut yang mewajibkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah paling lambat setahun sejak diundangkan pada 4 Juli 2008. Hingga kini Peraturan Pemerintah tersebut belum juga keluar padahal ada banyak hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut seperti antara lain program kemitraan UMKM dengan Usaha Besar.
2. Agar masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro khususnya berkenaan dengan modal dapat teratasi, maka sangat dibutuhkan peran dari Pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih meningkatkan informasi sekaligus sosialisasi kepada pelaku usaha tentang cara mengakses permodalan tersebut sehingga mereka tidak dimanfaatkan oleh para rentenir.
3. Debitur kredit mikro Sumut Sejahtera I ini selain berada di perkotaan juga sebagian besar berada di perdesaan. Untuk itu agar dibentuk lembaga penjaminan sampai ke tingkat perdesaan agar proses pelaksanaan Kredit Mikro Sumut Sejahtera II ini dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Building Sustainability Growth Through Good Corporate Governance Implementation*, 2010, Bank Sumut, Laporan Tahunan.
- Buku Pedoman Perkreditan Tentang Kredit Mikro Sumut Sejahtera II*, 2011.
- Widjanarko, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT.Temprint, Jakarta.
- 50 Tahun Kebersamaan*, 2011, Bank Sumut, Annual Report Laporan Tahunan.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Linggau, Bendi, Hamidah, 2010, *Bisnis Kredit Mikro, Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.